



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUYUNG WIROMO SAMUDRO**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN**
3. NHK : **63670**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.507.888.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 189.963.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/75 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 978.825.000
3. Tanah Seluas 182 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 917.100.000
4. Bangunan Seluas 33 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 422.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 185.000.000

1. MOBIL, TOYOTA STARLET SEDAN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA DIESEL MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 421.003.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 207.032.500**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 705.657.447**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.500.000

Sub Total Rp. 4.028.080.947

III. HUTANG Rp. 203.232.790**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.824.848.157

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.